

RINGKASAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan hingga saat ini masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cilacap. Kejahatan ini dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pemahaman hukum masyarakat, yang menyebabkan kelompok rentan khususnya perempuan dan anak mudah dieksploitasi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai bentuk komitmen negara dalam mencegah dan menindak praktik perdagangan orang secara tegas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*) serta sejauh mana efektivitasnya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap tergolong cukup efektif. Aparat penegak hukum telah mampu menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tepat, termasuk dalam membuktikan unsur eksploitasi dan mengungkap modus operandi perdagangan orang yang berbasis teknologi digital melalui penyamaran dan patroli siber. Hal ini tercermin dalam putusan pengadilan yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam penegakan hukum, antara lain kelemahan substansi hukum yang menuntut pembuktian unsur eksploitasi secara kompleks, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat yang masih memandang praktik perdagangan orang sebagai bagian dari dinamika ekonomi, seperti migrasi kerja atau prostitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

SUMMARY

Human trafficking constitutes one of the most serious forms of crime that violates fundamental human rights and remains a complex legal problem in Indonesia, including in Cilacap Regency. This crime is driven by various social, economic, and cultural factors such as poverty, low levels of education, and limited legal awareness within the community, which render vulnerable groups particularly women and children susceptible to exploitation. The Indonesian government has established several legal instruments, including Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking, as a manifestation of the state's commitment to preventing and combating human trafficking. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement in addressing human trafficking crimes in Cilacap Regency and to identify the obstacles encountered in its implementation.

The research employs an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, combining normative analysis of statutory regulations with empirical data obtained through interviews and field observations. This approach is used to examine how the law operates in practice (law in action) and to assess its effectiveness in tackling human trafficking crimes.

The findings indicate that law enforcement against human trafficking crimes in Cilacap Regency has been relatively effective. Law enforcement officers have been able to properly apply the provisions of Law Number 21 of 2007, particularly in proving elements of exploitation and uncovering trafficking modus operandi that utilize digital technology through undercover operations and cyber patrols. This effectiveness is reflected in court decisions that have imposed criminal sanctions on perpetrators in accordance with applicable legal provisions. Nevertheless, this study also reveals several challenges in law enforcement, including weaknesses in legal substance that require complex proof of exploitation elements, limitations in the capacity and resources of law enforcement personnel, and a low level of legal awareness within the community, where human trafficking practices are still perceived as part of economic dynamics such as labor migration or prostitution. Therefore, strengthening legal regulations, enhancing the capacity of law enforcement agencies, and increasing public legal awareness are necessary to ensure more effective and sustainable enforcement of laws against human trafficking.